

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. *PDRB Atas Harga Konstan Menurut Provinsi Tahun 2010-2020*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Portal Data*. dipublikasikan dalam *website* [Online] diakses pada 3 Maret 2021
- Febrianto, N. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Gujarati. (2012). *Econometrics By Example*. London:2011.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Accounting*.
- Masdiantini, E. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Nasution, N. P. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *ISSN:2087-4669 Vol. 8 No. 1*.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Pusat: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta Pusat: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Priyono, N. F. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*.
- Sari, I. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). *JOM Fekom Vol.3 No.1*.

Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta Pusat:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Widarjono. (Yogyakarta). *Ekonomi Pengantar dan Aplikasinya*. 2009: Ekonisia.